

## ABSTRAK

Kebijakan Tanah Kolektif di Maroko menjadi polemik antara perempuan dan laki-laki dimana kebijakan tanah masih mengacu pada hukum adat dan protektorat Prancis yang tercantum dalam Dekrit 1919. Kebijakan tersebut dianggap tidak adil dan cenderung mendiskriminasi perempuan, dalam hal ini perempuan Maroko tersingkirkan dalam daftar pemilik tanah kolektif dan sistem kepemilikan tanah kolektif diberikan kepada pihak laki-laki. Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan mengenai diskriminasi yang dialami Perempuan Maroko dan strategi yang digunakan untuk memperoleh dukungan dari publik menggunakan Teori Mobilisasi Sumber Daya dan Framing. Teori Mobilisasi Sumber Daya dan Framing digunakan untuk Perempuan *Sulaliyyate* menarik banyak dukungan dari masyarakat lokal maupun internasional melalui penyebaran isu tentang diskriminasi hak atas tanah melalui berbagai platform media massa. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan studi kepustakaan, data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, artikel, maupun literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Gerakan Perempuan *Sulaliyyate* dibantu oleh Lembaga-lembaga terkait seperti ADFM tidaklah mudah banyak penolakan bahkan ancaman bagi mereka yang menyuarakan tuntutan atas hak tanah hingga harus berjuang lebih dari 10 tahun untuk mendapatkan keadilan bagi kaum perempuan. Hal tersebut membuahkan hasil dengan dikeluarkannya kebijakan hak atas tanah bagi Perempuan *Sulaliyyate* yang mengatur kesetaraan kepemilikan tanah bagi laki-laki dan perempuan.

**Kata Kunci;** Kebijakan Tanah di Maroko, Gerakan Perempuan *Sulaliyyate*, Diskriminasi Hak Atas Tanah, Tanah Kolektif, ADFM.

## ABSTRACT

*The Collective Land Policy in Morocco has become a polemic between women and men where the land policy still refers to customary law and the French protectorate as stated in the 1919 Decree. This policy is considered unfair and tends to discriminate against women, in this case Moroccan women are excluded from the register of land owners. collective and collective land ownership system is given to the men. In this study, the author will describe the discrimination experienced by Moroccan women and the strategies used to gain support from the public using Resource Mobilization and Framing Theory. Theory of Resource Mobilization and Framing used for Women Sulaliyyate attracted a lot of support from local and international communities through spreading the issue of land rights discrimination through various mass media platforms. The research method in this paper uses literature study, secondary data from books, journals, articles, and other literature related to this research. Data analysis technique used in this research is qualitative data analysis technique. The Sulaliyyate Women's Movement is assisted by related institutions such as ADFM. It is not easy, there are many rejections and even threats for those who voice demands for land rights and have to fight for more than 10 years to get justice for women. This resulted in the issuance of a land rights policy for Sulaliyyate Women which regulates the equality of land ownership for men and women.*

**Keywords:** *Land Policy in Morocco, Sulaliyyate Women's Movement, Discrimination of Land Rights, Collective Land, ADFM.*